BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia sedang berada di era disrupsi (*disruption)*, yang ditandai oleh inovasi teknologi yang berkembang sangat cepat di berbagai industri. Fenomena ini dikenal dengan istilah *disruptive inovation*. Teori *disruptive inovation*, yang semakin banyak dibahas, pertama kali diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen. *Disruptive inovation* adalah pendekatan untuk memperluas dan mengembangkan pasar baru dengan menyediakan fungsionalitas baru, yang pada akhirnya dapat mengganggu pasar yang sudah ada. Banyak industri besar yang mengalami kegagalan karena tidak mampu merespon *disruptive inovation* ini. Salah satu contohnya adalah kegagalan industri *hard disk drive*, yang memberikan pelajaran berharga mengenai dampak dari *disruptive inovation* (Yu & Hang, 2020).

Fenomena *disruptive inovation* terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam industri jasa keuangan. Saat ini, *disruptive inovation* dalam jasa keuangan ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*. Meskipun ada perdebatan mengenai dampak *fintech* terhadap sektor keuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa *fintech*, yang didorong oleh perusahaan teknologi, menghadirkan tantangan tersendiri terutama dalam hal regulasi (Riyanto dkk., 2018). *Fintech* telah mengubah sektor keuangan, terutama dalam pembayaran ritel dan grosir, infrastruktur pasar keuangan, manajemen investasi, asuransi, penyediaan kredit, dan peningkatan modal. Teknologi baru seperti layanan *cloud*, *big data*, dan kecerdasan buatan (AI) terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan (Rahadiyan, 2022).

Model bisnis keuangan inovatif berbasis teknologi berkembang pesat di seluruh dunia. *Financial Stability Board* (FSB) bahkan telah memasukkan kajian tentang *fintech* dalam perspektif stabilitas keuangan sebagai bagian dari agenda kerjanya pada tahun 2017. Pertumbuhan *fintech* juga telah membuka peluang investasi baru yang terus meningkat. Pada tahun 2018, nilai investasi global di sektor *fintech* mencapai 111,8 miliar USD, dengan Amerika Serikat sebagai negara dengan investasi *fintech* terbesar, sebesar 52,5 miliar USD (FSB, 2023). Pandemi

Covid-19 turut mempengaruhi perkembangan *fintech* secara global, akan tetapi *fintech* tetap menjadi sektor yang menjanjikan. Data KPMG menunjukkan bahwa nilai investasi *fintech* secara global mencapai angka USD 51,9 Miliar pada periode tengah tahun pertama 2024. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai investasi *fintech* pada tengah tahun ke dua 2023 yang berada pada angka USD 62,3 Miliar. Hingga periode tengah tahun pertama 2024 Amerika Serikat masih menjadi negara dengan jumlah total investasi *fintech* terbesar di dunia melalui perolehan sebesar USD 38,5 Miliar (KPMG, 2024).

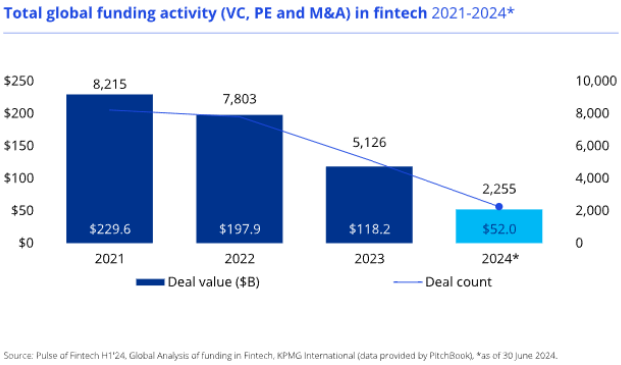

Sumber : (KPMG, 2024)

Gambar 1.1

Total global funding activity in *fintech* 2021-2024

Peningkatan ekonomi digital di Indonesia tidak lepas dari berbagai inovasi yang ada pada sektor tersebut. Mulai dari perkembangan industri *fintech*, pertumbuhan *E-commerce* yang pesat, peningkatan proses digitalisasi UMKM, serta dorongan Pemerintah berupa kebijakan dan regulasi yang mendukung berkembangnya ekonomi digital. Hal tersebut memberikan peluang besar bagi perkembangan industri *fintech* di Indonesia yang didukung oleh tingginya pengguna internet sejumlah 221 juta orang dengan penetrasi penggunaan ponsel pintar sebesar 233 juta pengguna. Selain itu, demografi Milenial dan Generasi Z menjadi populasi mayoritas signifikan yang mencakup sekitar 53,821% dari total penduduk Indonesia, hal ini selaras dengan Laporan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) *Annual Member Survey* (AMS) 2024 yang menunjukan bahwa pengguna *fintech* mayoritas adalah generasi Millenials dan Generasi Z mencapai 68,7%. Berdasarkan laporan *Google, Temasek,* dan *Bain, Gross Merchandise Value*

(GMV) internet Indonesia meningkat hingga USD 82 miliar. Dari sisi Pemerintah pun menargetkan pada tahun 2025, ekonomi digital di Indonesia dapat menembus angka USD 109 miliar yang didukung oleh data *East Ventures Digital Competitiveness Index* 2023, ekonomi digital Indonesia dapat melonjak hingga USD 360 miliar pada 2030 (OJK, 2024).

Tren ekonomi digital yang terus meningkat tentu perlu diimbangi dengan pengetahuan dan edukasi yang baik, mengingat masyarakat menjadi penggerak utama ekonomi digital di Indonesia. Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024 yang dirilis OJK, saat ini angka indeks literasi keuangan Indonesia berada di angka 65,43%, sedangkan, Indeks Inklusi Keuangan berada di angka 75,02%. Indeks inklusi keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan indeks literasi keuangan menunjukkan masih terdapat ketimpangan edukasi dan literasi dari pengguna jasa keuangan sehingga menjadi tantangan bersama bagi pelaku industri keuangan terutama terkait perlindungan konsumen. Perlu ada sinergi antara pemerintah selaku regulator serta pelaku industri untuk terus meningkatkan inklusi serta literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar potensi ekonomi termasuk ekonomi digital yang sangat besar dapat dicapai dengan optimal melalui pemahaman yang baik dari masyarakat selaku penggerak perekonomian (OJK, 2024).

Kompetisi di sektor *fintech* sangat tinggi, dengan banyak pemain baru yang masuk pasar, sehingga memaksa perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Regulasi juga menjadi tantangan karena perusahaan harus mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terkait operasional dan perlindungan konsumen. Selain itu, *fintech* harus dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan investor, terutama karena sektor ini sering kali dianggap memiliki risiko tinggi dibandingkan industri keuangan tradisional (Mansur dkk., 2021). Di Indonesia, regulasi terkait *fintech* diatur oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). OJK berperan dalam mengawasi perusahaan *fintech* yang bergerak di bidang pembiayaan dan *peer-to-peer lending*, sementara BI mengatur *fintech* yang terkait dengan pembayaran dan

sistem keuangan digital. Kementerian Keuangan juga terlibat dalam pengaturan pajak dan insentif bagi *fintech*. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan bahwa *fintech* beroperasi secara aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. (Hakim & Hapsari, 2022).

Perusahaan *fintech* yang ingin terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memenuhi beberapa syarat yang ketat. Pencatatan publik tidak hanya memberikan akses ke modal yang lebih besar melalui pasar saham, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan pelanggan. Proses ini mengharuskan *fintech* untuk menunjukkan transparansi dalam laporan keuangan dan operasional, serta mematuhi standar tata kelola yang baik. Pencatatan di BEI juga memberikan keuntungan dalam bentuk likuiditas saham, yang memungkinkan perusahaan *fintech* mendapatkan dukungan investasi yang lebih stabil untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang (Hakim & Hapsari, 2022).

Menurut (Copeland dkk., 2014), salah satu cara untuk menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan rasio Tobin’s Q. Dalam menilai nilai perusahaan, ada rasio Tobin's Q, yang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dengan menggabungkan nilai aset berwujud dan tidak berwujud. Rasio Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai penggantian asetnya, sehingga dapat mencerminkan seberapa baik perusahaan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Nilai Tobin’s Q yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa pasar menilai perusahaan lebih tinggi daripada biaya penggantian asetnya, mengindikasikan keunggulan kompetitif atau prospek pertumbuhan yang positif. Sebaliknya, nilai di bawah 1 dapat menandakan bahwa perusahaan kurang efisien atau kurang diminati oleh investor. Analisis rasio ini sangat berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan teknologi keuangan dalam tiga tahun terakhir, terutama di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.

Gambar 1.2 menunjukkan data nilai rata-rata perusahaan yang dihitung menggunakan Tobin's Q untuk perusahaan *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 hingga 2023.

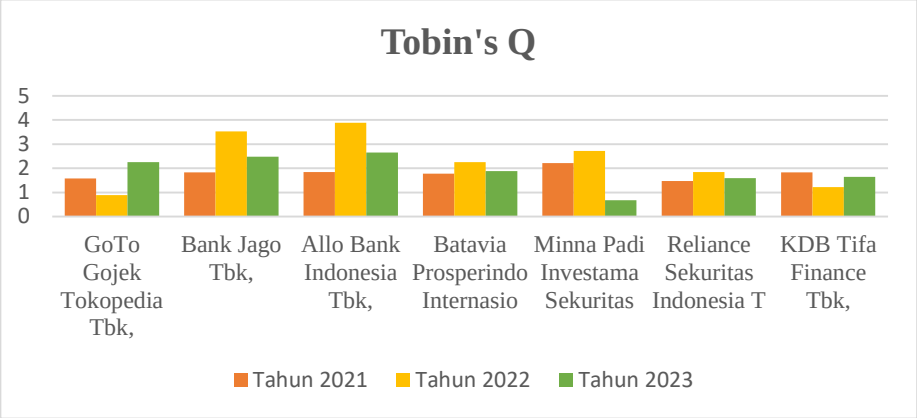

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah Peneliti, 2025)

Gambar 1.2

Grafik Nilai Perusahaan

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa nilai Tobin's Q perusahaan sektor *financial technology* yang terdaftar di BEI mengalami fluktuasi selama periode 2021–2023. Misalnya, (GoTo) Gojek Tokopedia Tbk. mencatat penurunan dari 1,578 pada 2021 menjadi 0,892 di 2022 (turun sekitar 43,47%), kemudian meningkat menjadi 2,249 pada 2023 (naik 151,99% dibanding 2022). Bank Jago Tbk. juga mengalami fluktuasi: naik dari 1,832 di 2021 menjadi 3,525 di 2022 (naik 92,43%), lalu turun ke 2,486 di 2023 (turun 29,49%).

Allo Bank Indonesia Tbk. menunjukkan pola yang mirip, dengan kenaikan dari 1,849 di 2021 menjadi 3,888 di 2022 (naik 110,23%), lalu menurun menjadi 2,659 di 2023 (turun 31,59%). Batavia Prosperindo Internasional mengalami peningkatan dari 1,773 di 2021 menjadi 2,257 pada 2022 (naik 27,27%), dan menurun ke 1,879 pada 2023 (turun 16,74%). Minna Padi Investama Sekuritas naik dari 2,213 di 2021 menjadi 2,715 di 2022 (naik 22,69%), namun turun tajam menjadi 0,684 di 2023 (turun 74,81%). Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. juga meningkat dari 1,474 di 2021 ke 1,847 di 2022 (naik 25,31%), lalu turun ke 1,593 di 2023 (turun 13,76%). Terakhir, KDB Tifa Finance Tbk. menunjukkan penurunan bertahap dari 1,825 (2021) ke 1,219 (2022) (turun 33,23%), kemudian naik ke 1,643 pada 2023 (naik 34,73%).

Perusahaan-perusahaan tersebut secara keseluruhan menunjukkan pola fluktuatif, dengan beberapa mengalami lonjakan dan penurunan yang signifikan. Minna Padi Investama Sekuritas tercatat sebagai perusahaan dengan penurunan paling drastis di tahun 2023, sementara GoTo dan Allo Bank menunjukkan pemulihan di tahun terakhir. Fluktuasi ini dapat menunjukkan adanya pengaruh dari faktor internal maupun eksternal perusahaan, seperti kualitas pengungkapan keberlanjutan, struktur tata kelola, dan dinamika pasar *fintech* di Indonesia (S. R. Rahmawati & Suhatini, 2024).

Isu-isu keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah menjadi perhatian global di berbagai sektor, termasuk *fintech*. Seiring dengan meningkatnya tuntutan dari para pemangku kepentingan, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia diharapkan untuk menjalankan praktik bisnis yang lebih transparan, bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana pengungkapan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mempengaruhi Nilai perusahaan pada perusahaan *fintech* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Muanifah dkk., 2023).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pada tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek, seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan. Setiap negara dan sektor diharapkan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, termasuk sektor bisnis yang memainkan peran penting dalam mencapai SDGs melalui operasi yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial (Dianty, 2024).

Alisajahbana & Murniningtyas (2018) membahas bahwa negara-negara di seluruh dunia bekerja untuk mencapai SDGs, entitas perusahaan didorong untuk bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan melakukan bagian mereka. Untuk itu, perusahaan didorong untuk bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan melakukan bagian mereka dalam mematuhi praktik-

praktik terbaik di bidang lingkungan dan sosial. Upaya ini termasuk meminimalkan dampak lingkungan mereka, mempromosikan keberagaman dan inklusi di tempat kerja, memastikan praktik-praktik lingkungan dan sosial yang baik, memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil, dan mempertahankan operasi bisnis yang transparan dan etis (Saha dkk., 2024).

Memasukkan SDGs ke dalam bisnis tampaknya merupakan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian berbagai tantangan global yang paling mendesak, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kemiskinan, tetapi juga memberikan peluang untuk memperluas tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, regulator, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat luas. Pendekatan ini dianggap mampu menciptakan nilai jangka panjang yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya berhasil memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam model bisnis mereka, yang hingga saat ini sebagian besar masih berorientasi pada penggerak utama keuntungan atau laba (Van der Waal & Thijssens, 2020).

Sustainable Development Goals memiliki relevansi yang kuat bagi sektor bisnis, termasuk *fintech*, karena semakin banyak konsumen dan investor yang memperhatikan praktik keberlanjutan perusahaan. Bisnis yang beroperasi sesuai dengan SDGs cenderung lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial, yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta daya tarik terhadap konsumen dan investor (Santoso & Raharjo, 2022). Di sektor *fintech*, pengadopsian SDGs dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti mempromosikan inklusi keuangan, memberikan akses kepada layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat bawah, serta mendukung pengurangan emisi karbon melalui operasional berbasis digital yang lebih efisien. Oleh karena itu, *fintech* yang mendukung SDGs dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan memainkan peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Budiantoro, 2024).

Perusahaan *fintech* menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam konteks SDGs. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memadukan operasional bisnis yang berbasis teknologi dengan tujuan keberlanjutan, seperti inklusi keuangan (SDG 1) yang bertujuan mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, *fintech* juga dapat berperan dalam inovasi industri dan infrastruktur (SDG 9) dengan mendorong transformasi digital di sektor keuangan, memfasilitasi transaksi yang lebih efisien, dan menyediakan produk keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Namun, untuk mewujudkan kontribusi ini, perusahaan *fintech* perlu mengatasi tantangan seperti regulasi yang ketat, keamanan data, dan risiko teknologi. Di sisi lain, peluang bagi *fintech* sangat besar, terutama dalam menciptakan solusi keuangan yang inovatif untuk mendukung pencapaian SDGs, yang tidak hanya bermanfaat secara sosial tetapi juga dapat meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang (Finpay, 2022).

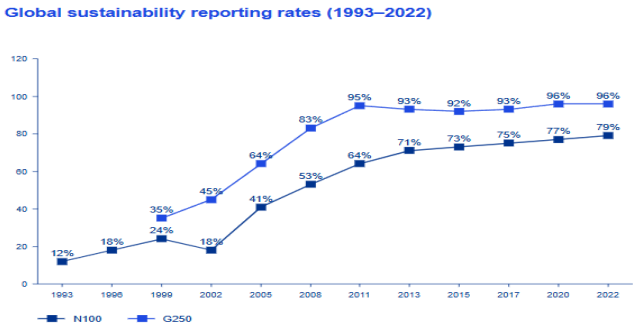

Sumber : (KPMG, 2024)

Gambar 1.3

Peningkatan Peloparan *Sustainable Report*

Fenomena terkini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang secara aktif mengungkapkan keterlibatan mereka dalam pencapaian SDGs sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran di kalangan investor dan konsumen akan pentingnya keberlanjutan, sehingga perusahaan yang mengungkapkan upaya mereka dalam mencapai SDGs cenderung lebih menarik bagi investor yang peduli dengan tanggung jawab sosial

perusahaan. Pengungkapan ini tidak hanya membantu perusahaan mendapatkan reputasi yang baik tetapi juga memberikan keuntungan kompetitif di pasar. Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC Indonesia), pada tahun 2022, sekitar 80% dari 250 perusahaan terbesar di dunia telah mengadopsi pelaporan terkait SDGs, menunjukkan tren yang semakin kuat menuju transparansi dalam hal keberlanjutan. Perusahaan *fintech* yang mengikuti jejak ini berpotensi meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai perusahaan mereka di pasar modal (PwC, 2023).

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien, adil, dan transparan, serta mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada para pemangku kepentingan (Lestari & Zulaikha, 2021).

Prinsip utama *Good Corporate Governance* meliputi transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada publik. Akuntabilitas yang menuntut perusahaan bertanggungjawab atas segala tindakannya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Responsibilitas, yang mengharuskan perusahaan menjalankan operasinya dengan penuh tanggung jawab terhadap hukum dan etika yang berlaku; serta keadilan, yang menjamin perlakuan setara dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor serta publik (Fabian & Wijaya, 2024).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan *financial technology* menjadi semakin krusial mengingat dinamika industri yang cepat berubah dan penuh risiko. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen memainkan peran sentral dalam menciptakan tata kelola yang efektif. Investor institusional seperti bank, dana pensiun, atau venture capital mampu memberikan pengawasan ketat terhadap manajemen melalui tekanan disiplin pasar dan pemantauan risiko yang lebih profesional, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas operasional perusahaan. Namun, tantangan muncul

ketika kepemilikan didominasi oleh investor yang berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, sehingga diperlukan mekanisme penyeimbang (Ichwan Syahrul Gunawan dkk., 2024).

Dewan komisaris independen berperan penting dan menjadi vital, terutama dalam memitigasi konflik kepentingan, mengawasi kepatuhan regulasi, serta meningkatkan transparansi pengungkapan informasi. Sinergi antara kepemilikan institusional yang aktif dengan dewan komisaris independen yang kompeten dapat menciptakan sistem *checks* and *balances* yang optimal, meskipun implementasinya di perusahaan *financial technology* sering menghadapi kendala seperti struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan keterbatasan SDM yang memahami kompleksitas industri (Sergakis, 2022). Dengan demikian, penguatan GCG melalui optimalisasi peran kedua elemen ini menjadi kunci bagi *financial technology* untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis di tengah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Kasus penipuan investasi yang terjadi pada beberapa platform *financial technology* lending ilegal di Indonesia pada tahun 2021 menjadi salah satu contoh nyata dari dampak pelanggaran *Good Corporate Governance* (Khomsiyah dkk., 2021). Banyak dari platform tersebut beroperasi tanpa izin yang sah dan tidak menerapkan prinsip tata kelola yang memadai, seperti akuntabilitas dan transparansi. Akibatnya, ribuan nasabah mengalami kerugian finansial yang signifikan, di mana banyak dari mereka tertipu oleh skema investasi palsu. Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* yang ketat di industri *financial technology* untuk melindungi nasabah, mencegah pelanggaran hukum, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor yang tengah berkembang pesat ini (Suhardjo dkk., 2024).

Perusahaan Gojek Tokopedia (GOTO), yang merupakan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, menghadapi tantangan signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi digital Indonesia. Penurunan tingkat pendanaan di sektor teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat pasca-pandemi memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menurut laporan *East Ventures Digital Trends* 2024, investasi di sektor teknologi mengalami penurunan sebesar 7,4% secara *year-*

on-year pada 2023, yang turut berdampak pada strategi efisiensi GOTO. Salah satu langkah yang diambil adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.300 karyawan pada 2022, dan jumlah pekerja yang terdampak meningkat menjadi 3.726 orang hingga akhir 2023. Langkah ini mencerminkan upaya perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pasar yang terus berubah (CNBC, 2024).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Gojek dan Tokopedia (GOTO) dipaksa untuk meningkatkan nilai mereka melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan keberlanjutan yang sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Untuk mengevaluasi pengaruh pengungkapan SDGs dan penerapan GCG terhadap nilai perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat, fenomena ini relevan untuk diteliti. Ini dilakukan karena pengungkapan SDGs menjadi salah satu strategi untuk menarik minat investor sekaligus menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan bisnis. Ini dilakukan khususnya dalam konteks industri teknologi di Indonesia. (CNBC, 2024).

Pelaksanaan SDGs ini akan memberi manfaat yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif yang bermanfaat untuk nilai perusahaan. Selain kualitas pengungkapan SDGs, *Good Corporate Governance* yang efisien juga berturut serta dalam peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan lebih menarik bagi investor sehingga nilai perusahaan pun bisa meningkat (Tsalis dkk., 2020).

Hal ini juga didukung oleh teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan bisnis. Potensi hubungan keberlanjutan perusahaan sektor *financial technology* dari segi kualitas pengungkapan SDGs, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan masih jarang diteliti dan terdapat perbedaan hasil dari literatur yang ada, dalam penelitian (Arifianti & Widianingsih, 2022) kualitas pengungkapan *sustainable development goals* tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Hasil tersebut disebabkan perusahaan pada sampel ini belum mengungkapkan kontribusi *Sustainable Development Goals* aspek Lingkungan

secara lengkap dan belum diungkapkan secara kuantitatif sehingga berdampak pada nilai skor yang rendah.

Penelitian (Alfiah & Arsjah, 2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan perusahaan terkait SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan daripada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan SDGs akan memberikan sinyal positif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai prospek masa depan perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan untuk kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya.

Studi yang dilakukan (Jackson dkk., 2020) dan (Bengo dkk., 2022) cenderung berfokus pada sektor perbankan dan BUMN, sementara penelitian khusus di sektor *financial technology (fintech*) masih sangat terbatas, padahal industri ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan nilai transaksi mencapai Rp476 triliun pada tahun 2022 (OJK, 2023). Adapun temuan penelitian di pasar modal Indonesia tidak konsisten yang dilakukan oleh Dianty (2024) menemukan pengaruh positif pengungkapan SDGs, sedangkan Rahmawati & Suhatini (2024), menunjukkan hasil tidak signifikan-sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dalam konteks *fintech* yang unik. Sementara penelitian (Haryani & Susilawati, 2023) menyatakan bahwa SDGs dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian utama dalam literatur saat ini biasanya berfokus pada satu aspek dan menghindari menggabungkan pengungkapan SDGs dan tata kelola perusahaan dalam satu analisis. Padahal kedua elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan *financial technology* di Bursa Efek Indonesia, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada industri lain, seperti industri manufaktur di China. (Suhardjo dkk., 2024).

Studi empiris di Indonesia yang mengintegrasikan ketiga variabel tersebut (pengungkapan SDGs, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen) dalam satu model penelitian masih sangat jarang, khususnya pada periode 2021-2023 yang merupakan masa kritis perkembangan Fintech pasca pandemi COVID-19. Keempat, penelitian terdahulu seperti Yoon & Lee (2023)

menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan di sektor teknologi, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan konteks spesifik perusahaan *fintech* di Indonesia. Implementasi regulasi spesifik seperti POJK No.51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan POJK No.13/2022 tentang *fintech* belum banyak diteliti dampaknya terhadap praktik pengungkapan dan nilai perusahaan, meskipun aturan ini mewajibkan transparansi dan pelaporan berkala (Haryani & Susilawati, 2023).

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengisi kesenjangan dan memperkaya literatur sebelumnya melalui penggabungan Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals*, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen dalam satu analisis yang komprehensif serta fokus pada beberapa perusahaan *Fintech* di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Sustainable Development Goals* dan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan *fintech* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam menyusun strategi yang lebih etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali "**Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan *Financial technology (Fintech)* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas pengungkapan *sustainbility development goals* (sdgs), kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh pada nilai perusahaan studi pada perusahaan sektor *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
2. Apakah kualitas pengungkapan *sustainbility development goals* (sdgs) berpengaruh pada nilai perusahaan studi pada perusahaan sektor *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada nilai perusahaan perusahaan sektor *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh pada nilai perusahaan perusahaan sektor *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan diatas adalah untuk :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kualitas pengungkapan *sustainable development goals*, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kualitas pengungkapan *sustainable development goals* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemilikan institusisonal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi pribadi peneliti sendiri, melainkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi lingkungan Universitas Jambi dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat hasil penelitian yang peneliti harapkan adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai nilai perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menganalisis hubungan antara *Sustainable Development Goals* (SDGs), kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, reputasi, serta daya saing di pasar, sehingga mampu menarik lebih banyak investor yang peduli pada keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat membantu perusahaan *fintech* dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan melalui kualitas pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Dengan memahami dampak dari kualitas pengungkapan SDGs dan penerapan tata kelola yang baik terhadap nilai perusahaan, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, reputasi, serta daya saing di pasar, sehingga mampu menarik lebih banyak investor yang peduli pada keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas pasar modal dan pembuat kebijakan terkait dalam menyusun regulasi yang mendorong transparansi kualitas pengungkapan SDGs, peningkatan kepemilikan instistusional dan dewan komisaris independen di sektor *financial technology*. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk beroperasi lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa perusahaan *financial technology* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikuti praktik tata kelola yang sesuai dengan standar internasional.
3. Bagi Investor, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi investor dalam menilai nilai perusahaan *financial technology* berdasarkan kuualitas

pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Investor yang semakin peduli dengan investasi berkelanjutan akan lebih memahami dampak dari kebijakan keberlanjutan dan tata kelola yang baik terhadap Nilai perusahaan, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan berorientasi jangka panjang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini memberikan kontribusi bagi literatur mengenai hubungan antara kualitas pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGs), kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan nilai perusahaan, khususnya di sektor *financial technology*. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mengeksplorasi lebih lanjut topik-topik terkait keberlanjutan, tata kelola, dan nilai perusahaan di sektor *financial technology* maupun sektor lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan metodologi penelitian yang lebih baik untuk studi terkait di masa mendatang, sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.